

SKRIPSI
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KELUARGA BERENCANA
(KB) DI DESA TELAGA WARU KEC. PERINGGABAYA
KAB.LOMBOK TIMUR TAHUN 2020

REGULATION OF IMPLEMENTATION FAMILY PLANNING PROGRAM
(KB) AT TELAGAWARU VILLAGE DISTRICT PRINGGABAYA OF EAST
LOMBOK

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Gelar Sarjana (SI)



DISUSUN OLEH :

SAIPUDIN
217130063

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH MATARAM
2021

HALAMAN PERSETUJUAN
SKRIPSI
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KELUARGA BERENCANA (KB)
DI DESA TELAGA WARU KECAMATAN PERINGGABAYA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2020



Disusun dan diajukan oleh:

SAIPUDIN
NIM. 217130063

PROGRAM STUDI
ILMU PEMERINTAHAN

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji pada ujian skripsi

Mataram, 26 Januari 2021

Pembimbing I

L. Sopan Tirta Kusuma, S.IP., M.Si
NIDN. 0825038303

Pembimbing II

Ayatullah Hadi, S.IP., M.IP
NIDN. 0816057902

Mengetahui.

Ketua Program Studi
ilmu Pemerintahan



Ayatullah Hadi, S.IP., M.IP
NIDN. 0816057902

PENGESAHAN SKRIPSI
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KELUARGA BERENCANA (KB)
DI DESA TELAGA WARU KECAMATAN PERINGGABAYA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2020

Oleh

SAIPUDIN
NIM. 217130063

PROGRAM STUDI
ILMU PEMERINTAHAN

Telah dipertahankan di depan penguji
Pada tanggal 28 Januari 2021
Dinyatakan telah memenuhi persyaratan

Tim Penguji

- | | |
|--|---------------------|
| 1. <u>L. Sopan Tirta Kusuma, S.IP., M.Si</u>
NIDN. 0825038303 | Penguji I (.....) |
| 2. <u>Ayatullah Hadi, S.IP., M.IP</u>
NIDN. 0816057902 | Penguji II (.....) |
| 3. <u>Drs. Amil, M.M</u>
NIDN. 0831126204 | Penguji III (.....) |

Mengetahui,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram
Dekan


Drs. H. Muhammad Ali, M.Si
NIDN. 0806066801

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik baik di UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH maupun di Perguruan Tinggi lainnya, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila ternyata di dalam Naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang saya peroleh (SARJANA) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Mataram, 8 Maret 2021
Mahasiswa,



SAIPUDIN
217130063



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

**SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SAIPUDIN
NIM : 217130063
Tempat/Tgl Lahir : APITAIK 103-06-1996
Program Studi : ILMU PENERITAHAAN
Fakultas : FISIPOL
No. Hp/Email : 087 866 747 121 / saipudin020696@gmail.com
Judul Penelitian :-

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KELUARGA BERENCANA <KB>
DI DESA TERAGA WARU KECAMATAN PERAYGABUYA
KABUPATEN MOMBOK RIWAY.

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. Saipudin

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari karya ilmiah dari hasil penelitian tersebut terdapat indikasi plagiarisme, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 24/02/2024

Penulis



SAIPUDIN
NIM 217130063

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SAIPUDIIN
NIM : 217130063
Tempat/Tgl Lahir : MPITAIK / 03-06-1986
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : FISIP01
No. Hp/Email : 089 866 747 121 / Saipudiin030696@gmail.com
Jenis Penelitian : Skripsi KTI

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KELUARGA BERENCANA (KKB)
DI DESA TERAGA WARU KAMMARAN PERINGGA SAYA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 24/02/2021

Penulis

SAIPUDIIN
NIM. 217130063

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

MOTTO

“Lakukan Hal Kecil dengan Tulus”



PERSEMBAHAN

Karya ilmiah ini kupersembahkan kepada kedua orangtua saya, saudara saya dan orang-orang tersayang disekeliling saya.



UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyadari bahwa penulisan proposal ini tidak mungkin terwujud apabila tidak ada bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, melalui kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan ucapan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abd Gani, M.Pd selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Bapak Dr. H. Muhammad Ali, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Ayatullah Hadi, S.IP., M.IP selaku Ketua Ilmu pemerintahan.
4. Bapak L. Sopan Tirta Kusuma, S.IP., M.IP selaku pembimbing utama dalam penulisan proposal skripsi ini.
5. Bapak Ayatullah Hadi, S.IP., M.IP selaku pembimbing pendamping dalam penulisan proposal skripsi ini.
6. Kedua orangtua saya ayah Herman dan ibu saya Sahirin yang selalu memberi semangat, doa dan dukungan yang tak henti-hentinya.
7. Teman-teman seperjuangan jurusan Administrasi Publik angkatan 2017.
8. Semua pihak yang terlibat yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Mataram, 25 Februari 2021

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis bisa menyelesaikan tanggung jawab untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Kebijakan Keluarga Berencana Di Desa Telaga Waru Kecamatan Peringgabawa Kabupaten Lombok Timur”. Penulis membuat skripsi ini untuk memenuhi sebagai persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu pemerintahan (S. IP) Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.

Penulis menyadari bahwa banyak kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki penulis, termasuk dalam penulisan skripsi ini baik secara bahasa, penulisan dan materinya. Apabila ada kesalahan dalam penulisan kata-katanya yang kurang dalam penulisan skripsi ini penulis mohon maaf dan kritik serta saran yang sifatnya membangun. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis serta pembaca untuk menambah pengetahuan dan referensi.

Mataram, 15 februari 2021

Saipudin
NIM. 217130063

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KELUARGA BERENCANA (KB) DI DESA TELAGA WARU
KECAMATAN PERINGGABAYA KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2020**

Saipudin¹, Ayatullah Hadi², Lalu Sopan Tirta Kusuma³
Mahasiswa¹, Pembimbing², Pembimbing Utama³
Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram

ABSTRAK

Program KB di Lombok Timur diharapkan dapat mencegah pernikahan usia dini. Target pemerintah daerah tersebut mengalami sejumlah kendala, seperti anggaran yang masih minim dan kesadaran masyarakat yang masih rendah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan KB di Desa Telaga Waru Kecamatan Peringgabaya Kabupaten Lombok Timur. Jenis penelitian yang di gunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dengan metode pengambilan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Dan informan dalam penelitian ini adalah Sekretaris Desa Telaga Waru, PLKB Desa Telaga Waru, kader Desa Telaga Waru dan masyarakat Desa Telaga Waru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan keluarga berencana (KB) di Desa Telaga waru variabel komunikasi, PLKB sudah melaksanakan tugasnya dengan baik dan mengikuti aturan undang-undang no 52 tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sebagai dasar pelaksanaan program kependudukan dan keluarga berencana. dan untuk komunikasinya sendiri pemerintah dan PLKB sudah mensosialisasikan program keluarga berencana ke masyarakat Desa Telaga Waru ke setiap-setiap dusun masing-masing secara langsung dengan sangat baik ke pada masyarakat. Selanjutna untuk variabel Sumber Daya pemerintah kabupaten lombok timur sudah menggolontorkan dana untuk menunjang program keluarga berencana yang berada di Desa Telga Waru walaupun masih kurang memadai dalam pelaksanaannya dan untuk sumber daya manusianya sendiri udah memenuhi klafikasi dan udah mahir dalam melaksanakan program keluarga berencana di Desa Telaga Waru. Sedangkan yang menjadi faktor pendukung adalah semangat dari petugas dan kader dalaam melaksanakan program KB di masyarakat untuk ikut berpartisipasi. Dan faktor penghambatnya adalah kurangnya sumber daya anggaran fasilitas sebagai penunjang program KB di Desa Telaga Waru.

Kata kunci : Impementasi, Kebijakan, Keluarga Berencana

POLICY IMPLEMENTATION OF FAMILY PLANNING (KB) IN THE VILLAGE OF TELAGA WARU, PRINGGABAYA, EAST LOMBOK IN 2020

Saipudin¹, Sopan Tirta Kusuma², Ayatullah Hadi³
Student¹, first supervisor², second supervisor³

Study Program of Government Science, Faculty of Social and Political Sciences
Muhammadiyah University of Mataram

ABSTRACT

The family planning program in East Lombok is expected to prevent early age marriage. This study aims to determine how the implementation of family planning policies in Telaga Waru Village, Pringgabaya, East Lombok. This research was a descriptive qualitative study. Method of data collection used observation, interviews, and documentation. The informants of this study were the village secretary of Telaga Waru, PLKB, cadres, and the community of Telaga Waru Village. The results showed that the implementation of family planning (KB) policies in Telaga Waru village on the communication variable, PLKB had carried out its duties properly and followed the rule of law no. 52 of 2009 concerning population development and family development as the basis for implementing population and family planning programs. The government and PLKB have directly socialized the family planning program to the Telaga Waru village community in their respective hamlets very well. As a resource variable, the East Lombok government has provided funds to support the family planning program in Telaga Waru Village, although it is still insufficient. Human resources have met the classification and are proficient in implementing family planning programs in Telaga Waru village. The supporting factor was the officers' and cadres' enthusiasm for implementing family planning programs in the community. The inhibiting factor was the lack of budget resources to support the family planning program in Telaga Waru Village.

Keywords: Implementation, Policy, Family Planning



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
BEBAS PLAGIARISME	v
PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
UCAPAN TERIMAKASIH.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
ABSTRAK	xi
<i>ABSTRACT</i>	<i>xii</i>
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
1.1 Manfaat Penelitian	7
2.1. Penelitian Terdahulu.....	8
2.2. Kebijakan Publik	11
2.2.1. Pengertian Kebijakan Publik.....	11
2.2.2 Tahap-Tahap Kebijakan Publik.....	14
2.3. Implementasi Kebijakan Publik.....	18
2.3 Pengertian Kebijakan Publik	18
2.3.2 Unsur-unsur Implementasi Kebijakan	19
2.3.3 Model-Model kebijakan Publik	20
2.4. Keluarga Berencana (KB)	23

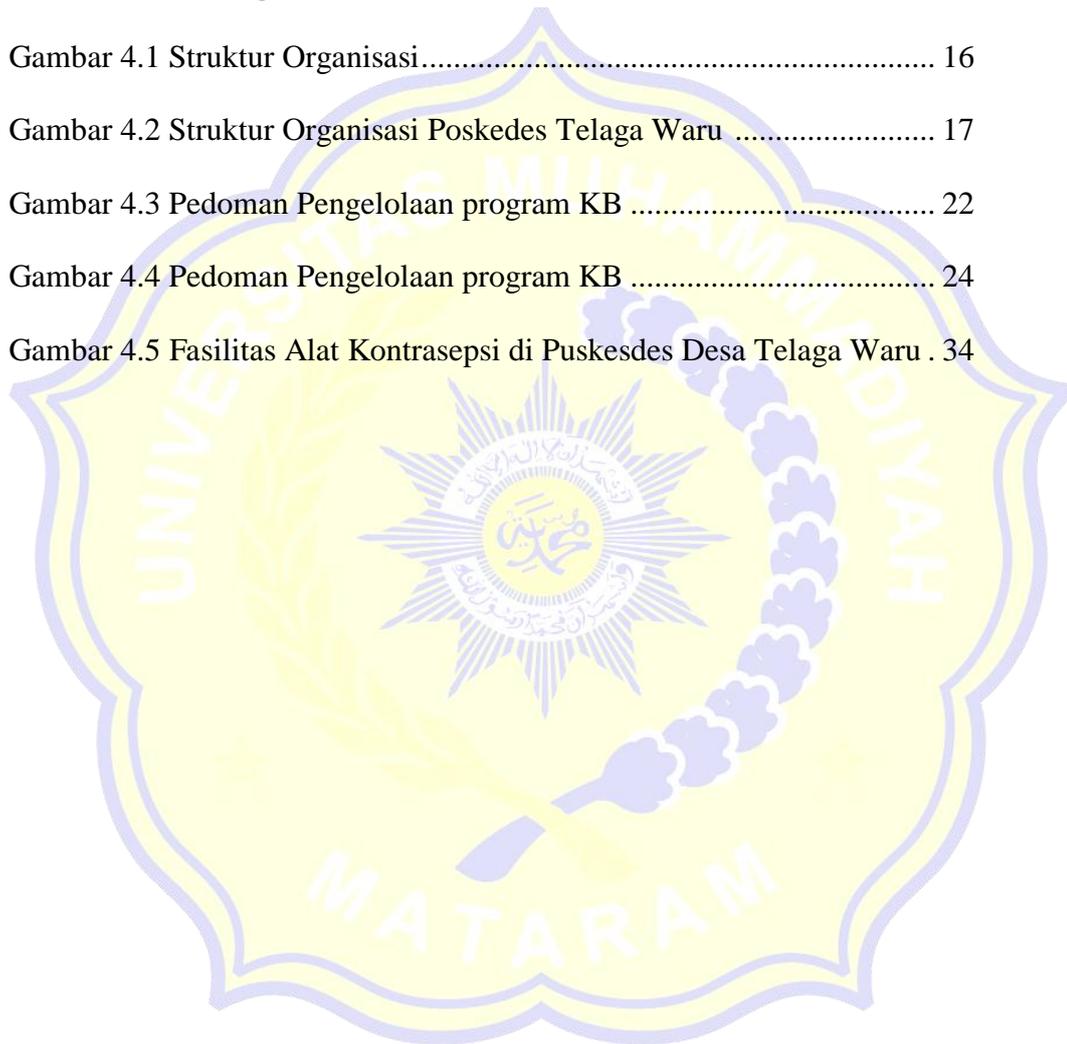
2.4.1 Pengertian KB.....	23
2.4.2 Tujuan KB (BKKBN,2015).....	24
2.5. Kampung/Dusun KB	25
2.5.1 Defenisi Kampung KB	25
2.5.2. Tujuan Kampung/Dusun KB (BKKBN,2015)	31
2.5.3 Syarat-Syarat Pembentukan Kampung/Dusun KB.....	32
2.5.4 Kriteria Wilayah Kampung/Dusun KB	33
2.5.5 Ruang Lingkup Kegiatan Kampung/Dusun KB.....	34
2.5.6 Sasaran Program	35
 BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis-Jenis Penelitian	40
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	40
3.3 Tehnik Penerapan Narasumber	40
3.4 Fokus Penelitian.....	41
3.5 Sumber Data.....	42
3.6 Tehnik Pengumpulan Data.....	42
3.7 Tehnik Analisa Data.....	43
3.8 Uji Keabsahan Data.....	44
 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1. Gambaran umum lokasi penelitian	47
4.1.1 sejarah umum lokasi penelitian.....	47
4.1.2 profil lokasi penelitian	48
4.1.3 Struktur Organisasi	63
Struktur Organisasi Poskedes Telaga Waru	64
4.2 Hasil dan Pembahasan	65
4.2.1 Implementasi Kebijakan KB di Desa Telegawaru Kecamatan Peringgabya Kabupaten Lombok Timur	65
 BAB V PENUTUP	
5.1. Kesimpulan	81
5.2. Saran.....	83
 DAFTAR PUSTAKA	
 LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	8
Tabel 3.1 Daftar Informasi Wawancara	41
Tabel 4.1 Data Luas Wilayah Menurut Tata Guna	3
Tabel 4.2 Tata Air di Desa Telegawaru	4
Tabel 4.3 Daftar Jumlah penduduk	5
Tabel 4.4 Tingkat Pendidikan Masyarakat	6
Tabel 4.5 Tingkat Kesejahteraan	6
Tabel 4.6 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kepercayaan	7
Tabel 4.7 Pencarian Masyarakat Di Desa Telegawaru	7
Tabel 4.8 Jenjang Pendidikan Aparat Lembaga Pemerintahan Desa	9
Tabel 4.9 Data Penduduk Menurut Usia	10
Tabel 4.10 Jumlah Penduduk Desa Telaga Waru	10
Tabel 4.11 Data Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Masyarakat	11
Tabel 4.12 Perhubungan dan Tranfortasi	13
Tabel 4.13 Jumlah Sarana Pendidikan	13
Tabel 4.14 Jumlah Sarana Kesehatan	14
Tabel 4.15 Perhubungan dan Tranfortasi	15
Tabel 4.16 Daftar Peserta Pelatihan PLKB	27
Tabel 4.17 Data Jumlah Kampung KB di NTB	28
Tabel 4.18 Tingkat Angka Pernikahan Dini Telaga Waru	29
Tabel 4.19 Tingkat Angka Kelahiran Setiap Tahun di Desa Telaga waru	30
Tabel 4.20 Sumber Daya Anggaran KB	32

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Tahapan Kebijakan Publik	8
Gambar 2.2 Pemetaan dan Perumusan Isu	29
Gambar 2.3 Penyusunan Rencana Kerja.....	30
Gambar 2.4 Kerangka Pikir Penelitian.....	36
Gambar 4.1 Struktur Organisasi.....	16
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Poskedes Telaga Waru	17
Gambar 4.3 Pedoman Pengelolaan program KB	22
Gambar 4.4 Pedoman Pengelolaan program KB	24
Gambar 4.5 Fasilitas Alat Kontrasepsi di Puskesmas Desa Telaga Waru .	34



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara adalah organisasi tertinggi di wilayah tertentu yang memiliki sekelompok masyarakat di dalamnya yang berpungsi sebagai alat untuk mengatur atau mengendalikan perseolan-perseolan secara bersama mengatasnamakan masyarakat dan mempunyai cita-cita untuk bersatu. Dan di suatu negara juga harus memiliki pemerintahan yang berdaulat, memiliki peraturan yang berdasarkan sistem hukum yang di alui oleh negara lainya.

Adapun disini masalah yang di hadai di berbagai negara adalah untuk mengurangi angka kemiskinan dengan menggunakan berbagai kebijakan, seperti peningkatan ekonomi, pembangunan infrastruktur, pembangunan jembatan, pasar dan sarana lainya, dan tidak kalah pentingnya adalah di dalam sektor pembangunan SDM melalu peningkatan sektor pendidikan dan peningkatan di sektor kesehatan.

Namun demikian faktor utama yang di hadapi semua negara baik negara maju dan berembang kendalanya hampir sama, yng pada umumnya bersumber dari permasalahan pada jumlah kependudukan . Dimana tiap hari jumlah angka jumlah kelahiran teus meningkat tiap harinya , dan juga masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang reproduksi sehingga angka kematin bayi dan ibu melahrkan trus meningkat.

Program KB di akui di berbagai negara di dunia mampu memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan ekonomi. Dan program KB juga di yakini menjadi instrumen penting dalam mendorong untuk meretas permasalahan yang di hadapi semua negara yaitu permasalahan kependudukan. Di semua Negara kebijakan KB ini tidak hanya focus pada pengendalian jumlah penduduk tetapi juga kualitas sumber daya akan semakin membaik. Dan permasalahan tentang KB ini menjadi pusat perhatian dari pemerintah di dunia bagaimana upaya untuk menanggulangnya sejak dini untuk membentuk keluarga yang lebih baik salah satunya di Negara india.

Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Keluarga India, Jagat Prakash Nadda, mengatakan, memiliki penduduk terbanyak kedua di dunia, yaitu sekitar 1,2 miliar jiwa adalah tantangan terbesar bagi pemerintah India. Belum lagi luas wilayah 36 negara bagian menjadi tantangan besar. Meski begitu, melalui program KB India berhasil menurunkan Total Fertility Rate (TFR) atau jumlah kelahiran sebesar 2,3 sebesar 24 dari 36 negara bagian dan juga sampai menurun hingga 2,1. Artinya semua perempuan yang berkeluarga memiliki 2 anak.

Dan besarnya tingka pertumbuhan penduduk di Indonesia yang mencapai 1,8% atau sama denganya 3 juta jiwa setiap tahunnya. Pemerintah harus menguatkan kembali program (KKBPK) kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga yang mengalami stagnan.

Situs resmi badan pusat statistic (BPS) menunjukkan, pertumbuhan yang saat ini mencapai 1,8%, sehingga pada di tahun 2020 jumlah penduduk di Indonesia akan meningkat sampai 270 juta jiwa. Dengan jumlah yang terus meningkat sebesar 16 ribu jiwa dari jumlah penduduk sebelumnya pada tahun 2015 yang mencapai 254 juta jiwa. Dengan jumlah ini akan semakin parah dan meningkat di tahun-tahun yang akan datang. Tentu dengan kondisi saat ini pemerintah harus segera mengatasinya, dengan laju pertumbuhan yang tidak terkendali bisa membawa dampak buruk untuk perkembangan Negara. Baik di dalam aspek kesehatan maupun ekonomi. (sumber : <http://www.yccp-indonesia.org>, 10/01/2018)

Factor utama dalam keberhasilan program KB adalah, adanya komitmen dari pemerintah di semua tingkatan, semangat dedikasi para pegawai KB di setiap dusun maupun desa di semua lini lapangan KB, fasilitas dan dukungan mitra kerja, integrasi lintas dan partisipasi aktif masyarakat. (sumber : petunjuk teknis kampung/dusun KB, BKKN 05).

Ruang lingkup pelaksanaan di dusun atau di desa program (KB) antara lain, keluarga berencana, pemberdayaan keluarga, kependudukan, ketahanan keluarga serta lintas sector di bidang social ekonomi, mengentaskan kemiskinan, kesehatan, pendidikan dan perlindungan anak. Dan KB ini bertujuan untuk membina peserta aktif KB dan mengurangi angka kemiskinan.

Pemerintah harus perlu untuk menguatkan kembali program (KKBPK) kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga.

Pada tahun 2015-2019 di gagas (RPJMN) rencana pembangunan jangka menengah nasional, dan (Renstra) rencana strategis BKKBN pada tahun 2015-2019, dengan 6 sasaran strategis yang telah ditetapkan yaitu : menurunkan angka laju pertumbuhan tingkat nasional per tahun dari 1,38% pada tahun 2015 menjadi 1,2% pada tahun 2019.

Menurutnya kebutuhan KB kurang terlayani dari pasangan usia subur dari 10,6% di tahun 2015 menjadi 9,91% pada tahun 2019, menurut (ASFR) age specific fertiliti rate dari 46 di tahun 2015 menjadi 38% per 1000 perempuan untuk kelompok umur di kesiran 15-19 pada tahun 2019, menurunnya angka presentase kehamilan yang tidak diinginkan dari usia subur 7,1% pada tahun 2015 menjadi 6,6% di tahun 2019 . (biro perencanaan BKKBN, petunjuk teknis kampong KB 2015).

Dalam upaya untuk mencapai enam sasaran strategis, (BKKBN) badan kependudukan dan keluarga berencana nasional yang diharapkan dapat menyusun semua kegiatan yang memperkuat upaya pencapaian sasaran yang bersentuhan langsung dan memberikan manfaat kepada masyarakat. Untuk menjawab semua tantangan tersebut maka di gagas program KB.

Badan keendudukan dan keluarga berencana nasional (BKKBN) NTB menargetkan pada tahun 2017 di bentuk 14 dusub KB di 10 kabupten dan kota di daerah itu. Pada target 2017 itu, satu kecamatan satu dusun KB, sehingga total 144 sesuai dengan jumlah kecamatan di NTB. Dan secara keseluruhan jumlah program KB yang sudah terbentuk di NTB sejak di luncurkan bapak presiden Joko Widodo pada tahun 2016 mencapai 89 di 10

kabupaten dan kota yang di mulai dari Mataram sampai Bima. ujar Makripuddin, (Antara NTB ,jumat,17 maret 2017).

Melalui program KB ini nantinya di harapkan dalam pelaksanaan program KKBPK dan program pembangunan lainnya dapat berjalan bersamaan. Dalam Hal ini sesuai amanat yang tertuang dalam agenda prioritas pembangunan terutama agenda prioritas ke 3 yaitu : memulai pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam rangka Negara kesatuan. Oleh karna itu apabila pembangunan kependudukan di mulai dari wilayah pinggiran yaitu di dusun, karena dusun merupakan cikal bakal terbentuknya desa, dan apabila pembangunan pada seluruh dusun maju, maka desapun kan maju, apabila seluruh desa maju maka sudah tentu Negara akan maju,

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/70/SJ/2016 tentang pembentukan dusun KB dan mengikuti arahan Presiden RI. Hal utama yang ingin di pastikan, menyangkut pelayanan KB untuk semua pasangan usia subur. Karena lotim sendiri katanya merupakan kabupaten penjaga utama terlaksananya kinerja program KB di NTB. Ini disebabkan karena jumlah sasaran KB di Lombok timur hampir mencapai 300 ribu, atau sekitar 26 persen dari keseluruhan sasaran KB di wilayah NTB.

Secara Umum kondisi kebijakan KB di Lombok Timur dari bulan Januari hingga Februari peserta akti KB tahun 2019 meningkat dari data yang di peroleh di masing-masing pusat kesehatan masyarakat

(Puskesmas).Meningkatnya peserta KB aktif sangat signifikan hal ini disampaikan oleh kepala badan Keluarga Berencana dan pemberdayaan perempuan (KBPP).

Adapun kegiatan pembinaanya yang akan dilaksanakan waktu dekat yaitu penyuluhan dan berkunjung ke rumah-rumah warga serta bantuan unit usaha peningkatan pendapatan masyarakat KB.Pemerintah desa akan mendukung semua pembinaan yang dilakukan baik yang berhubungan dengan kegiatan Kerohanian melauai penyuluhan maupun dengan modal usaha “Pemerintah Desa bertanggung jawab mensukseskan kegiatan tersebut” ungkapnyamuhammad Rohdi selaku Kades Telagawaru Kec Pringgabaya Kab Lombok Timur.

Menanggapi penancangan KB, Wagub NTB,Dr Sitti Rohmi Djailah pada tahun 2019 sangat mengapresiasi dan menyambut baik. Dalam sambutannya, Wagub berharap melalui KB ini dapat mewujudkan keluarga sejahtera dan keberhasilan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Tidak lupa Wagub juga meminta agar pemerintah provinsi NTB dan Pemerintah kota/kabupaten lebih mendukung dan memberi perhatian bagi para petugas di lapangan.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam lagi tentang bagaimana penerapan Keluarga Berencana di Desa Telega waru Kecamatan Pringgabaya kabupaten Lombok Timur dengan judul “Implementasi Kebijakan Keluarga Berencana (KB) di Desa Telegawaru Kecamatan Pringgabaya Kab Lombok Timur tahun 2020”.

1.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu bagaimana implementasi Kebijakan KB di Desa Telaga Waru Kecamatan Peringgabaya Kab Lombok Timur Tahun 2020?

1.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan di atas, maka tujuan dari penelitian yang hendak dicapai adalah untuk mengetahui Implementasi Kebijakan KB di DeSa Telaga Waru Kec. Peringgabaya Kab. Lombok Timur tahun 2020.

1.3 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

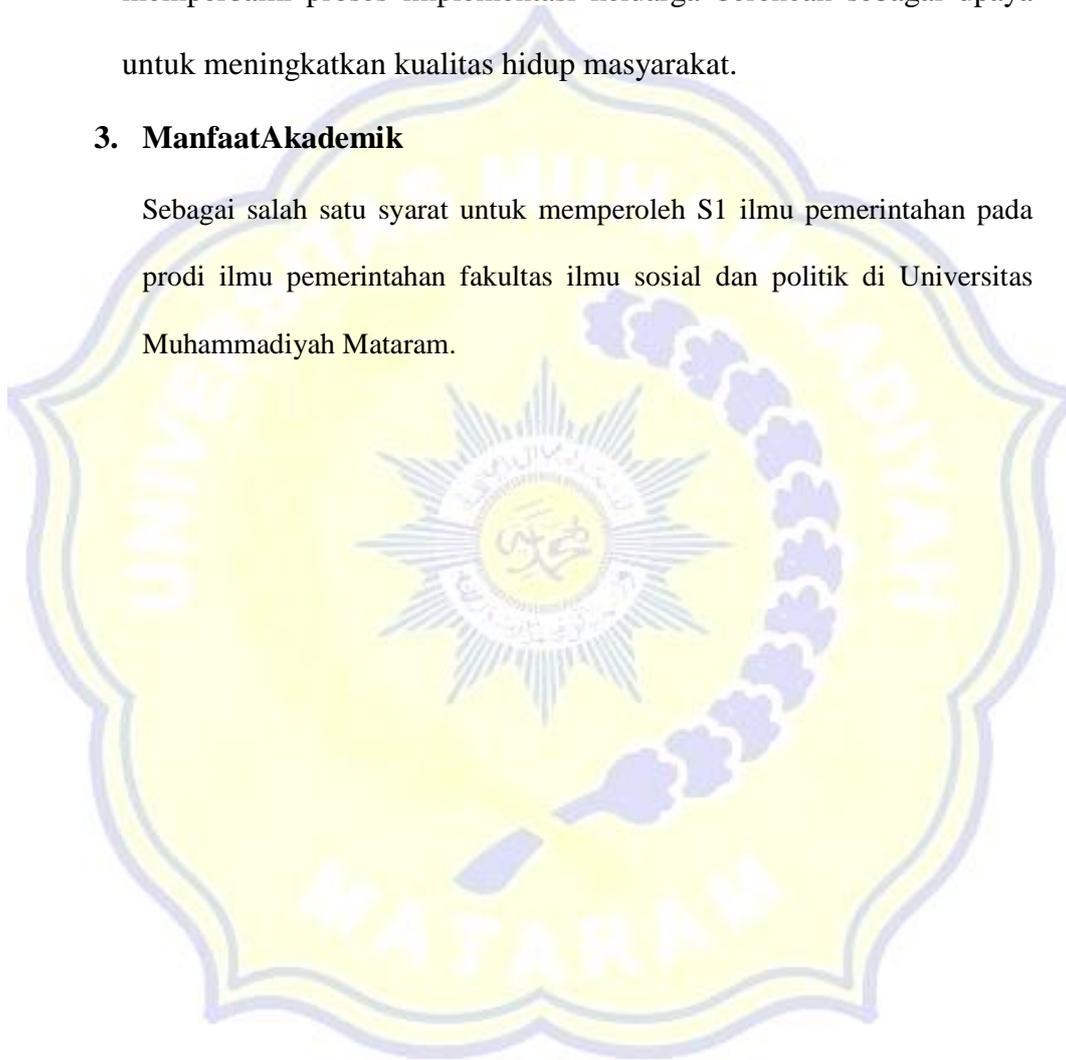
- a. Melalui penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan lebih mendalam bagi penulis tentang kebijakan Implementasi Kebijakan secara khusus, dan kebijakan ilmu pemerintahan secara umum.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan acuan bagi penelitian selanjutnya dan sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian sidang sarjana pada Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu politik di Universitas Muhammadiyah Mataram.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa program keluarga berencana dapat mengurangi tingkat ekonomi keluarga dan memberikan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan.
- b. untuk pengembangan pengetahuan ilmu pemerintahan sebagai upaya memperbaiki proses implementasi keluarga berencan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

3. Manfaat Akademik

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh S1 ilmu pemerintahan pada prodi ilmu pemerintahan fakultas ilmu sosial dan politik di Universitas Muhammadiyah Mataram.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Peneliti terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga dapat memperkaya teori teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu dapat dijadikan sebagai sumber referensi yang dapat memperdalam bahan kajian dan pembahasan penelitian. Adapun dari penelitian terdahulu sebagai berikut:

**Tabel 2.1
Pemetaan Hasil Penelitian Terdahulu**

No	Nama/Tahun	Judul	Jenis penelitian	Hasil Penelitian	Relevansi
1.	Nintrafil, Linda, Tahun 2018.	Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana (Studi Pada RW 06 Kampung Mekarlaksana Desa Citaman Kecamatan Negeri Kabupaten Bandung)	Kualitatif	Faktor penunjang dalam implementasi program kampung KB yaitu adanya sumber daya manusia yang berkualitas dan faktor penghambatnya yaitu kejelasan anggaran dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.	Keterkaitan penelitian ini membahas tentang implementasi serta metode penelitian yang digunakan sedangkan perbedaannya adalah dari segi penggunaan penerapan teori implementasi serta tempat penelitiannya
2.	Zaeni, Akhmad, Tahun	Implementasi Kebijakan Program Keluarga	Kualitatif	Implementasi kebijakan khususnya KB Pria dan faktor-faktor yang	Keterkaitan penelitian ini membahas tentang implementasi

	2018.	Berencana Di Kabupaten Batang Studi Kasus Peningkatan Kesertaan KB Pria Di Kecamatan Gringsing		mempengaruhi implementasi kebijakan program KB.	serta metode penelitian yang digunakan sedangkan perbedaannya adalah dari segi penggunaan penerapan teori implementasi serta tempat penelitiannya
3.	Ariani, Desi, Tahun 2018.	Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana Di Desa Percut Kecamatan Percut Tuan Kabupaten Deli Serdang	Kualitatif	Ada beberapa indikator yang menghambat implementasi seperti sumber daya, hubungan antar organisasi dari berbagai impelentor yang perlu di perbaiki.	Keterkaitan penelitian ini membahas tentang implementasi serta metode penelitian yang digunakan sedangkan perbedaannya adalah dari segi penggunaan penerapan teori implementasi serta tempat penelitiannya
4.	Nosa arighi Bachtiyar dan sriwibawani Tahun 2017	Implementasi program kampung keluarga berencana di dusun ambeng-ambeng desa ngigas kecamatan waru kabupaten siduarjo	Kualitatif	Implementasi program kampung KB didusun Ambeng-ambeng secara umum telah berjalan dengan baik.hanya saja salah satu kegiatan yg belum terlaksana pusat konseling remaja.	Keterkaitan penelitian ini membahas tentang implementasi serta metode penelitian yang digunakan sedangkan perbedaannya adalah dari segi penggunaan penerapan teori implementasi serta tempat

					penelitiannya
5.	Elsa Setiawati Tahun (2017)	Persepsi masyarakat terhadap program kampung keluarga berencana di kelurahan pantolan boya kecamatan tawaeli	Kualitatif	Persepsi masyarakat terhadap program kampung KB di kelurahan pentoloan boya kecamatan tawaeli sangat baik dengan adanya program kampung KB diantaranya penggunaan alat kontrapensi dan keberihan lingkungan yang mana seluruh masyarakat yg berada dilingkungan kampung KB menjadi salah satu contoh program kampung KB yang ada di provinsi Sulawesi Tengah	Keterkaitan penelitian ini membahas tentang persepsi serta metode penelitian yang digunakan sedangkan perbedaannya adalah dari segi penggunaan penerapan teori implementasi serta tempat penelitiannya

Sumber : Jurnal-Jurnal Nasional

Beberapa penelitian diatas dapat disimpulkan sebagai berikut.

Pertama, Nintrafil, (2006) melakukan penelitian jenis kualitatif tentang Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana (Studi Pada

RW 06 Kampung Mekarlaksana Desa Citaman Kecamatan Kabupaten Bandung program tersebut sangat penting untuk menekan pertumbuhan penduduk sekaligus memberdayakan potensi masyarakat sebagai salah satu pengendalian penduduk.

Kedua, Zaeni (2018) melakukan penelitian jenis kualitatif tentang Implementasi Kebijakan Program Keluarga Berencana Di Kabupaten Batang Studi Kasus Peningkatan Kesertaan KB Pria Di Kecamatan Gringsing program KB untuk pria ini; 1) Sumber daya manusia; 2) sosialisasi program; 3) koordinasi; 4) trukur kelembagaaan organisasi.

Ketiga, Desi (2018) melakukan jenis penelitian kualitatif tentang Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana Di Desa Percut Kecamatan Percut Seituan Kabupaten Deli Serdang menunjukkan bahwa implementasi kebijakan program dilihat dari; 1) Standar sasaran kebijakan; 2) Sumber daya; 3) Hubungan antar organisasi; 4) karakteristik; 5) Disposisi; 6) kondisi sosial politik dan ekonomi.

Keempat Nosa Arighi Bachtiyar dan Sriwibawani (2017) melakukan jenis penelitian kualitatif tentang Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana di Dusun Ngigas Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo menunjukkan bahwa implementasi kebijakan program dilihat dari :1) sumber daya ; 2) Kualitas hubungan interirganisasional dan 3) karakteristik Organisasi

KelimaElsa Setiawati (2017) Persepsi Masyarakat Terhadap Program Kampung Keluarga Berencana di Kelurahan Pantolan Boya Kecamatan Tawaeli Menunjukkan bahwa kebijakan program dilihat dari persepsi masyarakat yang mana melalui sikap/tanggapan, tindakan dan harapan masyarakat.

2.2 Kebijakan Publik

2.2.1 Pengertian Kebijakan Publik

Secara etimologi, istilah kebijakan (*policy*) berasal dari bahasa Yunani Sanskerta, dan Latin. Selanjutnya, Willian Dunn menerangkan bahwa akar kata dalam bahasa Yunani dan Sanskerta, yaitu *polis*(negara-kota) dan dikembangkan dalam bahasa Latin menjadi *politia* (negara) dan akhirnya dalam bahasa Inggris *policie*, yang berarti menangani masalah-masalah publik atau administrasi pemerintahan (Dunn, 1999: 51-52).

Anderson dalam Mulyadi (2016:165), mendefinisikan kebijakan publik merupakan kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah. Kebijakan publik sebagai serangkaian kegiatan atau tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan.

Nugroho dalam Mulyadi (2016:165), mengemukakan kebijakan publik adalah usaha pencapaian tujuan atau sebagai aktivitas-aktivitas yang dikerjakan untuk mencapai tujuan yang dapat disederhanakan dengan mengetahui sejauh mana kemajuan pencapaian yang telah ditempuh.

Menurut Dye dalam Suaib (2016:72), kebijakan publik adalah apa saja yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Dalam pengertian ini, pusat perhatian dari kebijakan publik tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, melainkan termasuk apa saja yang tidak dilakukan oleh pemerintah. Apa saja yang tidak dilakukan oleh pemerintah itulah yang memberikan dampak cukup besar terhadap masyarakat seperti halnya dengan tindakan-tindakan atau program-program yang dilakukan pemerintah.

Jenkin dalam Suaib (2016:74), mengatakan kebijakan publik adalah serangkaian keputusan yang saling berkaitan, yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor politik berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam suatu situasi dimana keputusan-keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari para aktor tersebut.

Secara umum, istilah “kebijakan” atau “*policy*” digunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Pengertian kebijakan seperti ini dapat kita gunakan dan relatif memadai untuk keperluan pembicaraan-pembicaraan biasa, namun menjadi kurang memadai untuk pembicaraan-pembicaraan yang lebih bersifat ilmiah dan sistematis menyangkut analisis kebijakan publik. Oleh karena itu, kita memerlukan batasan atau konsep kebijakan publik yang tepat.

Beberapa batasan untuk keperluan analisis kebijakan yang dapat digunakan, salah satunya menurut Robert Eystone Ia mengatakan bahwa “secara luas” kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai “hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya”. Batasan lain tentang kebijakan publik yang diberikan oleh Thomas R. Dye yang mengatakan bahwa “kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan”. Walaupun batasan yang diberikan oleh Dye ini dianggap agak tepat, namun batasan ini tidak cukup member pembedaan yang jelas antara apa yang diputuskan oleh pemerintah untuk dilakukan dan apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah.

Carl Friedrich memandang kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan peluang-peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangkai mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu.

Batasan-batasan dikemukakan oleh Anderson konsep kebijakan publik ini kemudian mempunyai beberapa implikasi, yakni *pertama*, titik perhatian kita dalam membicarakan kebijakan publik berorientasi pada maksud dan tujuan dan bukan perilaku secara serampangan. *Kedua*, kebijakan merupakan arah atau pola tindakan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan-keputusan yang tersendiri. *Ketiga*, kebijakan adalah apa yang sebenarnya dilakukan oleh

pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengendalikan inflasi, atau mempromosikan perumahan rakyat dan bukan apa yang diinginkan oleh pemerintah. *Keempat*, kebijakan publik mungkin dalam bentuknya bersifat positif atau negatif.

2.2.2 Tahap-Tahap Kebijakan Publik

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu, beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik ke dalam beberapa tahap. Tujuan pembagian seperti ini adalah untuk memudahkan kita di dalam mengkaji kebijakan publik. Namun demikian, beberapa ahli mungkin membagi tahap-tahap ini dengan urutan yang berbeda. Seperti misalnya, tahap penilaian kebijakan seperti yang tercantum dalam bagian di bawah ini bukan merupakan tahap akhir dari proses kebijakan publik, sebab masih ada satu tahap lagi, yakni tahap perubahan kebijakan dan terminasi atau hentikan kebijakan. Tahap-tahap kebijakan publik menurut William Dunn sebagai berikut.

Gambar 2.1

Tahap-Tahap Kebijakan Publik William Dunn (1999)



Sumber: Dunn William. *Pengantar Analisis Kebijakan*. Hal 25

1. Tahap penyusunan agenda

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah-masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk ke dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini suatu masalah mungkin tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu tunda untuk waktu yang lama.

2. Tahap formulasi kebijakan

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (*policy alternatif*

/policy options) yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk ke dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Pada tahap ini, masing-masing aktor akan “bermain” untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.

3. Tahap adopsi kebijakan

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau keputusan pengadilan.

4. Tahap implementasi kebijakan

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elite, jika program tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu, keputusan program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumberdaya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana (*implementasi*), namun beberapa yang lain mungkin dan ditentang oleh para pelaksana.

5. Tahap evaluasi kebijakan

Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan. Dalam hal ini, memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, ditentukanlah ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang diinginkan.

Adapun tahap kebijakan publik yang lebih ringkas menurut Widodo (2007) yaitu:

1. Tahap formulasi kebijakan

Tahap formulasi kebijakan adalah langkah yang paling awal dalam proses kebijakan publik secara keseluruhan. Oleh karena itu, apa yang terjadi dalam fase ini akan sangat menentukan berhasil atau tidaknya sebuah kebijakan yang dibuat itu dimasa yang akan datang. Widodo (2007) menjelaskan manakala proses perumusan tidak dilakukan secara tepat dan komprehensif, hasil kebijakan yang dirumuskan tidak akan mencapai tataran yang optimal, yaitu sulit diimplementasikan, bahkan bisa jadi tidak dapat diimplementasikan.

2. Tahap implementasi kebijakan

Tahap implementasi kebijakan merupakan tahap selanjutnya setelah tahap perumusan kebijakan. Tahapan ini merupakan tahap dalam proses kebijakan yang sangat crucial, karena bagaimanapun baiknya kebijakan yang sudah diputuskan, kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan secara

baik dalam implementasinya, maka tujuan kebijakan tidak akan bisa diwujudkan.

3. Tahap evaluasi kebijakan

Tahap evaluasi kebijakan yang merupakan tahapan akhir dalam proses kebijakan. Sebuah kebijakan publik tidak bisa lepas begitu saja, sebuah kebijakan publik tidak bisa lepas begitu saja, kebijakan harus diawasi dan dinilai sejauhmana keefektifan kebijakan publik guna dipertanggungjawabkan pada konstituennya (publik/masyarakat).

2.3 Implementasi Kebijakan Publik

2.3.1 Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program. Implementasi pada sisi yang lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (*output*) maupun sebagai suatu dampak (*outcome*).

Menurut Mazmanian dan Sebatier dalam Wahab (2012:135), implementasi adalah memahami apa yang sebenarnya terjadi sesudah sesuatu Program dinyatakan berlaku atau dirumuskan, yang merupakan focus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan

kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan public yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

2.3.2 Unsur-unsur Implementasi Kebijakan

Unsur-unsur dalam implementasi kebijakan merupakan faktor penting. Dengan kata lain dalam mengimplementasikan kebijakan publik harus ada unsur-unsur sebagai sarana sehingga dihasilkan implementasi yang efektif. Unsur-unsur penting tersebut menurut Abdullah dan Smith (Tachjan, 2006:26) yaitu unsur pelaksana (implementor), adanya program yang dilaksanakan dan target group.

a. Unsur pelaksana

Pihak yang utama mempunyai kebijakan untuk melaksanakan kebijakan publik adalah unit-unit administratif atau unit-unit birokratik pada setiap tingkat pemerintah.

b. Adanya program yang dilaksanakan

Kebijakan administrasi yang masih berupa pernyataan-pernyataan umum yang masih berisikan tujuan, sasaran, serta berbagai macam sarana agar dapat diimplementasikan hal tersebut perlu dijabarkan kembali kedalam program yang bersifat operasional. Program implementasi ini memiliki ciri-ciri:

1. Sasaran hendak dicapai.
 2. Jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu.
 3. Besarnya biaya yang diperlukan beserta sumbernya.
 4. Jenis-jenis kegiatan yang akan dilaksanakan.
 5. Tenaga kerja yang dibutuhkan baik ditinjau dari segi jumlahnya maupun dilihat dari sudut kualifikasi serta keahlian dan ketrampilan yang diperlukan.
- c. Target group

Target group merupakan kelompok sasaran dimana terdiri dari sekelompok orang atau organisasi dalam masyarakat yang akan menerima barang dan jasa yang akan dipengaruhi perilakunya oleh kebijakan (Tachjan, 2006:35)

2.3.3 Model-model Implementasi Kebijakan Publik

Kebijakan yang telah direkomendasikan untuk dipilih oleh policy makers Implementasi dari suatu program melibatkan upaya-upaya policy makers untuk implementasinya. Ada banyak variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan baik yang bersifat individu maupun kelompok atau mempengaruhi perilaku birokrat pelaksana agar bersedia memberikan pelayanan dan mengatur kelompok sasaran.

Keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor, dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. Untuk memperkaya pemahaman kita tentang

berbagai variabel yang terlibat didalamnya, maka kita akan melihat beberapa teori implementasi kebijakan sebagai berikut:

Menurut teori implementasi kebijakan Edawar III dalam Agustino (2008:149), terdapat empat variable yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu:

a. Komunikasi

Komunikasi merupakan suatu hal yang sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari pelaksanaan atau implementasi suatu program/kebijakan. Komunikasi menyangkut proses penyampaian informasi atau transmisi, kejelasan informasi tersebut serta konsistensi informasi yang disampaikan. Pengetahuan atas apa yang mereka kerjakan dapat berjalan apabila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan. Ada tiga indikator yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan aspek komunikasi ini, yaitu:

1. Transmisi, yaitu penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu hasil implementasi atau pelaksanaan yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam proses transmisi yaitu adanya salah pengertian, hal ini terjadi karena komunikasi pelaksanaan tersebut telah melalui beberapa tingkatan birokrasi, sehingga hal yang diharapkan terdistorsi di tengah jalan.
2. Kejelasan informasi, dimana komunikasi atau informasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak

mbingungkan. Kejelasan informasi kebijakan tidak selalu menghalangi pelaksanaan kebijakan atau program, dimana pada tataran tertentu para pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan program, tetapi pada tataran yang lain maka hal tersebut justru akan menyelewengkan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan yang telah ditetapkan.

b. Sumberdaya

Sumberdaya adalah faktor penting untuk pelaksanaan program agar efektif, dimana tanpa sumberdaya maka program atau kebijakan hanya sekedar kertas dokumen. Ada empat komponen yang meliputi, yaitu:

1. Staf, sumberdaya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten di bidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak mencukupi, tetapi diperlukan pula kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.
2. Anggaran merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya dan tanpa adanya

fasilitas pendukung maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

Berdasarkan dari penjelasan di atas mengenai implementasi kebijakan, maka dalam fokus penelitian ini peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan menurut Edward III yang menyatakan terdapat empat variabel yang menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Alasan peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan publik dari Edward III, karena program Kampung KB bersifat Top-Down, artinya program tersebut dicanangkan oleh pemerintah kepada masyarakat, yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pembangunan berwawasan kependudukan, untuk menurunkan angka kelahiran tinggi, serta dapat mengendalikan angka kemiskinan sehingga masyarakat dapat kesejahteraan yang layak. Di mana variabel ataupun indikator yang dikemukakan oleh Edward III merupakan variabel yang menjelaskan secara komprehensif tentang kinerja implementasi dan dapat lebih konkret dalam menjelaskan proses implementasi yang sebenarnya.

1. **Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan**

Menurut Turner dan Hulme dalam Pasolong (2011:59), Implementasi kebijakan mempunyai beberapa kebijakan yang mempengaruhi pelaksanaan suatu kebijakan publik. Hambatan ini dapat dengan mudah dibedakan atas hambatan dari dalam (faktor internal) dan dari luar (faktor eksternal), yaitu:

a. Hambatan dari dalam (faktor internal), dapat dilihat dari ketersediaan dan kualitas input yang digunakan seperti sumber daya manusia, dana, struktur organisasi, informasi, sarana dan fasilitas yang dimiliki, serta aturan-aturan sistem dan prosedur yang harus digunakan.

b. Hambatan dari luar (faktor eksternal), dapat dibedakan atas semua kekuatan yang berpengaruh langsung ataupun tidak langsung kepada proses implementasi kebijakan pemerintah, kelompok sasaran, kecenderungan ekonomi, politik, kondisisosial budaya dan sebagainya.

2.4 Keluarga Berencana (KB)

2.4.1 Pengertian KB

KB menurut WHO (World Health Organisation) adalah tindakan yang membantu individu atau pasangan suami isteri untuk : (1) menghindari kelahiran yang tidak diinginkan, (2) mendapatkan kelahiran yang diinginkan, (3) mengatur interval diantara kelahiran, (4) mengontrol waktu saat kelahiran dalam hubungan dengan umur suami dan istri, (5) menentukan jumlah anak dalam keluarga (Hartanto, 2004).

KB adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera (Juliantoro, 2000).

Pelayanan KB diberikan di berbagai unit pelayanan baik oleh pemerintah maupun swasta dari tingkat desa hingga tingkat kota dengan kompetensi yang sangat bervariasi. Pemberi layanan KB antara lain adalah Rumah Sakit, Puskesmas, dokter praktek swasta, bidan praktek swasta dan bidan desa. Jenis alat/obat kontrasepsi antara lain kondom, pil KB, suntik KB, AKDR, implant, vasektomi, dan tubektomi. Untuk jenis pelayanan KB jenis kondom dapat diperoleh langsung dari apotek atau toko obat, pos layanan KB dan kader desa, Pelayanan kontrasepsi suntik KB sering dilakukan oleh bidan dan dokter sedangkan pelayanan Alat KB Dalam Rahim (AKDR), implant dan vasektomi/tubektomi harus dilakukan oleh tenaga kesehatan terlatih dan berkompeten.

2.4.2 Tujuan KB (BKKBN,2015)

Kebijakan KB bertujuan untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk melalui usaha penurunan tingkat kelahiran. Kebijakan KB ini bersama-sama dengan usaha-usaha pembangunan yang lain selanjutnya akan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Upaya menurunkan tingkat kelahiran dilakukan dengan mengajak Pasangan Usia Subur (PUS) untuk berkeluarga berencana. Sementara itu penduduk yang belum memasuki usia subur (Pra-PUS) diberikan pemahaman dan pengertian mengenai keluarga berencana.

Menunjang dan mempercepat pencapaian tujuan pembangunan dalambidang KB telah ditetapkan beberapa kebijakan, yaitu perluasan jangkauan, pembinaan terhadap peserta KB agar secara terus menerus

memakai alat kontrasepsi, pelembagaan dan pembudayaan Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera (NKKBS) serta peningkatan keterpaduan pelaksanaan KB. Selanjutnya untuk mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut terus dimantapkan usaha-usaha operasional dalam bentuk upaya pemerataan pelayanan KB, peningkatan kualitas baik tenaga, maupun sarana pelayanan KB, penggalangan kemandirian, peningkatan peran serta generasi muda, dan pemantapan pelaksanaan program di lapangan.

2.5 Kampung/Dusun KB

2.5.1 Definisi Kampung/dusun KB

KB adalah sebuah program yang dicanangkan pemerintah dalam menekan kepadatan penduduk. Pengertian program KB menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1992, tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera Pasal 1 Ayat 12 adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan (PUP), pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera. Sedangkan penertian program KB menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009, Ketentuan Umum tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Bab 1 Pasal 1 Ayat 8 KB adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.

Kampung/Dusun KB merupakan satuan wilayah setingkat RW atau setara, yang memiliki kriteria tertentu, dimana terdapat keterpaduan program kependudukan, KB, pembangunan keluarga dan pembangunan sektor terkait yang dilaksanakan secara sistemik dan sistematis. Kampung/dusun KB direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi oleh dan untuk masyarakat. Pemerintah, Pemerintah daerah, lembaga non pemerintah dan swasta berperan dalam fasilitasi, pendampingan dan pembinaan (BKKBN,2015).

Seperti yang telah disebutkan dalam definisi Kampung/Dusun KB di atas, lokasi dalam program ini harus memiliki kriteria khusus yaitu desa dengan jumlah masyarakat miskin paling banyak, serta yang jumlah akseptor KB paling sedikit. Maka dari itu, lokasi Kampung/Dusun KB di seluruh kabupaten/kota ialah desa terpencil, tertinggal, dan terbelakang.

Perbedaan lain ialah, Kampung/Dusun KB merupakan tempat terintegrasinya program pembangunan dari seluruh lintas sektor. Pada Juknis Kampung/Dusun KB dituliskan bahwa lingkup kegiatan Kampung/dusun KB tidak hanya fokus pada kegiatan program KKBPK saja, melainkan ada kegiatan kesehatan reproduksi, ketahanan dan pemberdayaan keluarga, pembangunan permukiman, pendidikan, hingga peningkatan sosial ekonomi masyarakat. Maka dari itu, pada pelaksanaan Kampung KB lintas sektor dilibatkan secara aktif. (Sumber :<http://www.yccp-indonesia.org>, 10/01/2019).

Untuk lebih memperlancar pelaksanaan kegiatan di lapangan, hal penting lain yang diperlukan ialah pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) dari perangkat desa, petugas kesehatan desa seperti bidan, serta perwakilan komunitas seperti kader, tokoh masyarakat, dan tokoh agama. Keberadaan Pokja ini penting karena merekalah yang akan menjadi motivator dan motor penggerak di lapangan.

Untuk itu, perlu strategi yang tepat, salah satunya dengan membentuk kelompok kerja lintas sektor baik di tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa. Tujuannya agar terjalin kerjasama dan koordinasi antar para pemangku kepentingan. Adapun penjelasan mengenai masing-masing kelompok kerja di berbagai tingkat wilayah adalah sebagai berikut:

1. Kelompok Kerja Advokasi Kependudukan dan KB Provinsi/ Provincial Working Group (PWG)

Beranggotakan para pemangku kepentingan di tingkat provinsi yang berasal dari perwakilan pemerintah, organisasi keagamaan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi profesi, akademisi, lembaga donor, dan sektor swasta yang dibentuk berdasarkan situasi, kondisi dan kebutuhan spesifik daerah. Tugas dan tanggung jawab PWG adalah melakukan advokasi kebijakan di tingkat provinsi dan pembinaan, serta pemantauan kegiatan advokasi Kampung/Dusun KB di tingkat kabupaten /kota.

2. Kelompok Kerja Advokasi Kependudukan dan KB Kabupaten-Kota /District Working Group (DWG)

Beranggotakan para pemangku kepentingan di tingkat kabupaten/kota yang berasal dari perwakilan pemerintah, organisasi keagamaan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi profesi, akademisi, lembaga donor, dan sektor swasta yang dibentuk berdasarkan situasi, kondisi dan kebutuhan spesifik daerah. Tugas dan tanggung jawab DWG adalah menyusun perencanaan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi program kerja dalam upaya advokasi Kampung/Dusun KB di tingkat kabupaten/ kota. Selain itu DWG juga bertugas untuk mengadvokasi camat, kepala puskesmas dan pemegang kebijakan lainnya di tingkat kecamatan agar bersedia mendukung dan memfasilitasi terbentuknya Tim KB Desa/Kelurahan, termasuk untuk meningkatkan pelayanan MKJP oleh bidan atau dokter di tingkat desa/kelurahan.

3. Tim KB Kecamatan

Beranggotakan para pemangku kepentingan di tingkat kecamatan yang berasal dari perwakilan pemerintah, organisasi keagamaan, dan sektor swasta yang dibentuk berdasarkan situasi, kondisi dan kebutuhan spesifik daerah. Tugas dan tanggung jawab Tim KB Kecamatan adalah melakukan pembinaan dan memantau pelaksanaan program kerja advokasi Kampung KB di tingkat desa.

4. Tim KB Desa-Kelurahan/Tim Kampung/Dusun KB

Beranggotakan para pemangku kepentingan di tingkat desa yang berasal dari perwakilan pemerintah, tokoh agama/tokoh masyarakat, perwakilan kelompok masyarakat dan individu yang dibentuk berdasarkan

situasi, kondisi dan kebutuhan spesifik daerah. Tugas dan tanggung jawab Tim KB Desa/Kelurahan adalah menyusun perencanaan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi program kerja dalam upaya peningkatan capaian Kampung/Dusun KB di tingkat desa.

Setelah pokja-pokja terbentuk, langkah lain yang bisa dilakukan ialah:

- Sinkronisasi perencanaan program, kegiatan, hingga anggaran Kampung/Dusun KB di setiap sektor terkait.
- Advokasi kepada pemerintah daerah untuk mendanai operasional pokja di tingkat provinsi dan kabupaten. Sedangkan untuk Tim KB Kecamatan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Tim KB Desa (TKBD) menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa)
- Melakukan advokasi kepada kepala desa untuk menganggarkan kegiatan Kampung/Dusun KB melalui APB Desa.

Berikut 2 tahap alat perencanaan Kampung/Dusun KB-SMART, tahap pertama yaitu pemetaan dan perumusan isu, tahap kedua penyusunan rencana kerja, sebagai berikut:

1. Pemetaan dan perumusan isu

Gambar 2.2

Pemetaan Dan Perumusan Isu



Sumber : <http://www.yccp-indonesia.org>

Tahap pertama pemetaan dan perumusan isu membawa peserta berdiskusi untuk lebih mengenali wilayah Kampung/Dusun KB secara mendalam. Peserta mulai mengidentifikasi sasaran wilayah, menggambar peta desa wilayah Kampung/Dusun KB, mengidentifikasi sarana dan prasarana yang dimiliki, data kependudukan, hingga program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta permasalahan yang ada di desa tersebut. Ketersediaan dan kualitas data menjadi kunci utama pada tahap ini. Sehingga kegiatan ini sekaligus mendorong peserta memahami pentingnya data dan penggunaannya dalam menyusun rencana kegiatan.

2. Penyusunan rencana kerja

Gambar 2.3

Penyusunan Rencana Kerja



Sumber : <http://www.yccp-indonesia.org>

Tahap dua yaitu penyusunan rencana kerja. Peserta mulai dengan menetapkan tujuan Kampung/Dusun KB dengan kaidah SMART. Yaitu tujuan disusun secara spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan dan berjangka waktu. Kemudian peserta menentukan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dalam mencapai tujuan tersebut. Hasil diskusi pada langkah-langkah sebelumnya menjadi landasan menyusun rencana kerja, menetapkan indikator keberhasilan pada setiap kegiatan, menyusun rangkaian kegiatan, dan terakhir membuat rencana tindak lanjut.

2.5.2 Tujuan Kampung/Dusun KB (BKKBN,2015)

1. Tujuan umum

Meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara melalui program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga serta pembangunan sektor terkait dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas

2. Tujuan khusus

- a. Meningkatkan peran pemerintah, pemerintah daerah, lembaga nonpemerintah dan swasta dalam memfasilitasi, pendampingan dan pembinaan masyarakat untuk menyelenggarakan program kependudukan, keluarga berencana, pembangunan keluarga dan pembangunan sektor terkait.
- b. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pembangunan berwawasan kependudukan.
- c. Meningkatkan jumlah peserta KB aktif modern.
- d. Meningkatkan ketahanan keluarga melalui program Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), dan Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja.
- e. Meningkatkan pemberdayaan keluarga melalui Kelompok UPPKS.
- f. Menurunkan angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).
- g. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
- h. Meningkatkan rata-rata lama sekolah penduduk usia sekolah.
- i. Meningkatkan sarana dan prasarana pembangunan kampung.
- j. Meningkatkan sanitasi dan lingkungan kampung yang sehat dan bersih
- k. Meningkatkan kualitas keimanan para remaja/mahasiswa dalam kegiatan keagamaan (pesantren, kelompok ibadah/kelompok doa/ceramah keagamaan) di kelompok PIK KRR/remaja. Meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air para remaja/mahasiswa dalam

kegiatan sosial budaya (festival seni dan budaya, dan lain-lain) dikelompok PIK KRR/mahasiswa dan seterusnya.

2.5.3 Syarat-syarat Pembentukan Kampung/dusun KB

Proses pembentukan, suatu wilayah yang akan dijadikan sebagai lokasi Kampung/DusunKB perlu memperhatikan persyaratan wajib yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Tersedianya Data Kependudukan yang Akurat Data Kependudukan yang akurat adalah data yang bersumber dari Hasil Pendataan Keluarga, data Potensi Desa dan data Catatan Sipil yang akurat sehingga dapat digunakan sebagai dasar penetapan prioritas, sasaran dan program yang akan dilaksanakan di suatu wilayah Kampung/Dusun KB secara berkesinambungan.
2. Dukungan dan komitmen Pemerintah daerah Komitmen dan peranan aktif seluruh instansi/unit kerja pemerintah khususnya Perintahan Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan dalam memberikan dukungan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di kampung/Dusun KB dan memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan bidang tugas instansi masing masing untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.
3. Partisipasi Masyarakat yang berpartisipasi aktif Partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan dan pelaksanaan seluruhkegiatan yang akan dilakukan di kampung/Dusun KB secara berkesinambungan gunameningkatkan taraf hidup seluruh masyarakat yang di wilayahnya.

2.5.4 Kriteria Wilayah Kampung/Dusun KB

Dalam memilih atau menentukan wilayah yang akan dijadikan lokasi Kampung/Dusun KB ada tiga kriteria yang dipakai, yaitu :

- a. Kriteria utama yang mencakup dua hal:
 1. Jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan KS 1 (miskin) di atas rata-rata Pra Sejahtera dan KS 1 tingkat desa/kelurahan di mana kampung/Dusun tersebut.
 2. Jumlah peserta KB di bawah rata-rata pencapaian peserta KB tingkat desa/kelurahan di mana kampung/Dusun KB tersebut berlokasi.
- b. Kriteria wilayah: yang mencakup 10 kategori wilayah (dipilih salah satu):
 1. Kumuh,
 2. Pesisir,
 3. Daerah Aliran Sungai (DAS),
 4. Bantaran Kereta Api,
 5. Kawasan Miskin (termasuk Miskin Perkotaan),
 6. Terpencil,
 7. Perbatasan,
 8. Kawasan Industri,
 9. Kawasan Wisata,
 10. Padat Penduduk.

Selanjutnya dalam menentukan criteria wilayah yang akan dijadikan sebagai lokasi pembentukan Kampung/Dusun KB dapat dipilih satu atau lebih dari sepuluh criteria yang ada

c. Kriteria Khusus, yang mencakup 5 hal, yaitu:

1. Kriteria data di mana setiap RT/RW memiliki Data dan Peta Keluarga.
2. Kriteria kependudukan di mana angka partisipasi penduduk usia sekolah rendah.
3. Kriteria program KB di mana peserta KB Aktif dan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) lebih rendah dari capaian rata-rata tingkat desa/kelurahan serta tingkat unmet need lebih tinggi dari rata-rata tingkat desa/kelurahan.
4. Kriteria program pembangunan keluarga di mana partisipasi keluarga dalam pembinaan ketahanan keluarga, pemberdayaan ekonomi dan partisipasi remaja dalam kegiatan Generasi Berencana melalui Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) masih rendah.
5. Kriteria program pembangunan sektor terkait yang mencakup setidaknya empat bidang, yakni kesehatan, ekonomi, pendidikan, pemukiman dan lingkungan, dan masih bisa ditambah dengan program lainnya sesuai dengan perkembangan.

2.5.5 Ruang lingkup kegiatan Kampung/Dusun KB

Adapun ruang lingkup pelaksanaan kegiatan di Kampung/Dusun KB meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Kependudukan;

2. Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
3. Ketahanan Keluarga dan Pemberdayaan Keluarga (Pembangunan Keluarga)
4. Kegiatan Lintas Sektor (Bidang Pemukiman, Sosial Ekonomi, Kesehatan, Pendidikan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan sebagainya disesuaikan dengan kebutuhan wilayah Kampung KB).

2.5.6 Sasaran program

1. Sasaran

Sasaran merupakan suatu subjek dan objek dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Kampung/Dusun KB adalah sebagai berikut:

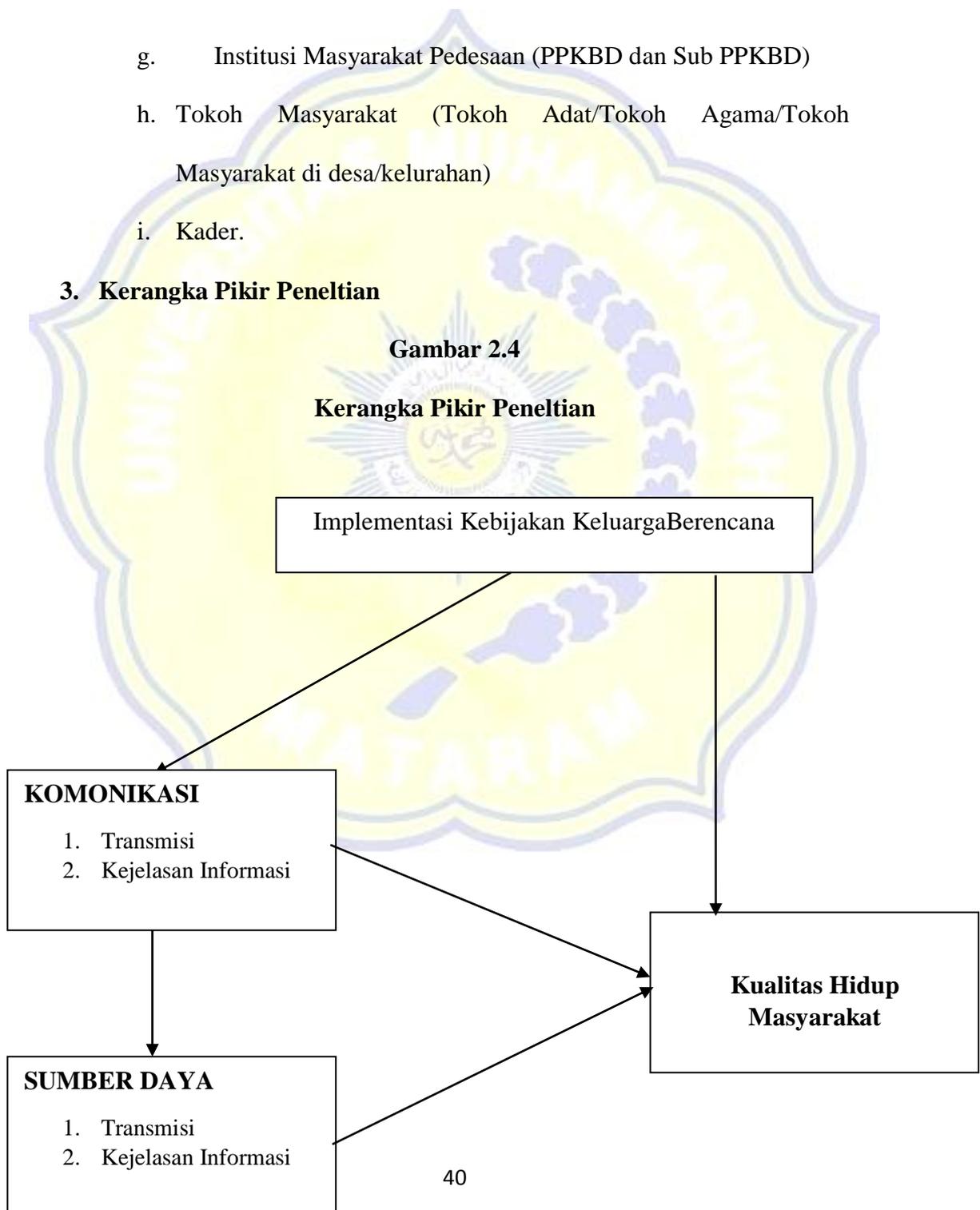
- a. Keluarga
- b. Remaja
- c. Penduduk Lanjut Usia (Lansia)
- d. Pasangan Usia Subur (PUS)
- e. Keluarga dengan balita
- f. Keluarga dengan remaja
- g. Keluarga dengan lansia
- h. Sasaran sektor sesuai dengan bidang tugas masing masing

2. Pelaksana:

- a. Kepala Desa/Lurah
- b. Ketua RW

- c. Ketua RT
- d. PKB/PLKB/TPD
- e. Petugas Lapangan sektor terkait
- f. Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tingkat Desa
- g. Institusi Masyarakat Pedesaan (PPKBD dan Sub PPKBD)
- h. Tokoh Masyarakat (Tokoh Adat/Tokoh Agama/Tokoh Masyarakat di desa/kelurahan)
- i. Kader.

3. Kerangka Pikir Penelitian



Sumber Edward III (Aggustino,2008)

5. Definisi Konseptual

1. Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program. Implementasi pada sisi yang lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (*output*) maupun sebagai suatu dampak (*outcome*).
2. Komunikasi merupakan suatu hal yang sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari pelaksanaan atau implementasi suatu program/kebijakan. Komunikasi menyangkut proses penyampaian informasi atau transmisi, kejelasan informasi tersebut serta konsistensi informasi yang disampaikan. Pengetahuan atas apa yang mereka kerjakan dapat berjalan apabila komunikasi berjalannya dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan. Adatiga indikator yang dapat digunakan dalam mengukur

keberhasilan aspek komunikasi ini, yaitu: Sumberdaya adalah faktor penting untuk pelaksanaan program agar efektif, dimana tanpa sumberdaya maka program atau kebijakan hanya sekedar kertas dokumen. Ada empat komponen yang meliputi, yaitu: Staf, sumberdaya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf. Kegagalan yang seiring terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten dibidangnya penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak mencukupi, tetapi diperlukan pula kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri. Anggaran merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya dan tanpa adanya fasilitas pendukung maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

6. Definisi Operasional

Komunikasi

1. transmisi
2. kejelasan informasi

Sumber Daya

1. Staf / sdm

2. anggaran



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, yang bertujuan memberi gambaran secara jelas fenomena atau kenyataan sosial yang berkenaan dengan masalah yang diteliti (Prastowo 2010). Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dirancang untuk menggambarkan subjek penelitian dengan cara yang akurat, sedangkan penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang berpola investigasi dimana data-data dan pernyataan diperoleh dari hasil interaksi langsung antara peneliti, objek yang diteliti dan orang-orang yang ada ditempat penelitian.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun lokasi dan waktu penelitian akan dilakukan di kantor BKKBN Lombok Timur dan di Desa Telegawaru, Kecamatan Pringabaya, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Penetapan lokasi berdasarkan pertimbangan bahwa lokasi sudah melaksanakan program keluarga berencana sehingga lokasi yang sangat tepat untuk memperoleh data atau informasi yang akurat dan relevan dengan permasalahan penelitian yang ada. Waktu pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu 2 bulan.

3.3 Teknik Penetapan Narasumber

Dalam kegiatan penelitian yang menjadi sumber informasi adalah para informan yang berkompeten dan mempunyai relevansi dengan

penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan “*purposive sampling*” yaitu metode pengambilan sample yang dipilih dengan cermat sehingga relevan dengan struktur penelitian, dimana pengambilan sample dengan mengambil orang-orang yang dipilih oleh penulis (Djarwanto, 1998:34). Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Kepala BKKBN Lombok Timur, Kepala Desa Telegawaru, petugas BLKB Desa Telegawaru, dan masyarakat setempat.

Tabel 3.1

Daftar informasi Wawancara

No	Nama	Jabatan	Jumlah
1	Asrul Sani M.Kes.	Kepaladinas BKKBN	1
2	Muhamad Rohdi	Kades telagawaru	1
3	Winarti oktaviarini Amd, Keb.	Petugas Penyuluh BLKB	1
4	Ibu Rosyani	Masyarakat Desa	1
5	Ibu Nurhayati	Masyarakat Desa	1
6	Ibu Wati	Masyarakat Desa	1
7	Ibu Watul	Masyarakat Desa	1
8	Ibu Anggi	Masyarakat Desa	1

Sumber : Diolah Penelit 2020

3.4 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini dimaksudkan untuk studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana yang

tidak relevan (Moleong, 2010). Pembatasan dalam penelitian kualitatif ini lebih didasarkan pada bagaimana implementasi kebijakan keluarga berencana (KB) di Desa Telega Waru, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur tahun 2020.

3.5 Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder :

1. Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari tangan pertama lapangan berdasarkan hasil observasi dan wawancara.
2. Data sekunder adalah sumber data yang dikutip dari sumber lain dalam bentuk dokumen literatur, brosur , dan karangan para ahli yang dianggap mempunyai hubungan dengan masalah yang diteliti.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dapat dilakukan dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi.

1. Metode Observasi

Nasution (1998) menyatakan bahwa,observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuan hanya dapat bekerja berdasarkan data,yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang di peroleh melalui observasi.

Berdasarkan pendapat diatas,maka observasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengamatan uyang sengaja dilakukan secara langsung.

2. Metode Wawancara

Esterberg (2002), wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Berdasarkan pendapat ini, dapat dinyatakan bahwa metode wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab atau dialog secara langsung, yang dilakukan oleh pewawancara dengan responden untuk memperoleh informasi yang digunakan.

3. Metode Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari dokumen, yang artinya barang-barang tertulis, metode dokumentasi berarti cara mengumpulkan data dan mencatat data yang sudah ada.

Berdasarkan pendapat di atas maka yang dimaksud dengan metode dokumentasi ialah cara-cara untuk memperoleh data yang dilakukan dengan cara mencatat keterangan-keterangan yang terdapat pada dokumen-dokumen lainnya. Yang terkait dengan masalah yang akan ditulis.

3.7 Teknis Analisis Data

Dalam penelitian ini peneliti melakukan analisis data kualitatif dengan cara memberikan gambaran tentang bagaimana implementasi kebijakan kampung keluarga berencana di Desa Telegawaru, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur. Penelitian ini menggunakan data kualitatif maka hasil analisis data bersifat deskriptif. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi.

Dalam penelitian ini,teknik analisis data yang digunakan adalah teknik kualitatif,dengan mengikuti alur kegiatan Miles dan Huberman (1984) dalam Sugiyono (2013) yang terdiri dari beberapa tahap,yakni:

1. Data Reduksi

Merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan,keluasan dan kedalaman wawancara yang tinggi. Mereduksi data berarti merangkum,memilih hal-hal yang pokok,mempfokuskan pada hal-hal yang penting dan dicari tema dan polanya.Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas,dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya,dan mencari bila diperlukan reduksi data dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini,dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.

2. Penyajian Data

Dalam penelitian ini kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat,bagan,hubungan antar kategori,diagram aliran, dan sejenisnya. Dalam hal ini yang digunakan untuk penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif

3. Penarikan Kesimpulan

Langkah ketiga dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan data verifikasi,kesimpulan awal dikemukakan masih bersifat sementara,dan akan berubah bila tidak ada di temukan bukti-bukti yang kuat yang mengandung pada tahap pengumpulan data berikutnya.Tetapi apabila

kesimpulan yang di kemukakan pada tahap awal awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

3.8 Uji Keabsahan Data Kualitatif

Agar data yang diperoleh dijamin keabsahannya sehingga dapat dipertanggung jawabkan hasil penelitiannya, maka perlu melakukan triangulasi. Menurut Moleong (2011:330) “Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai penanding untuk data itu”. Menurut Danzim dalam Moleong (2011:330) membedakan “empat macam Triangulasi sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan penggunaan *sumber, metode, penyidik, dan teori*”.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan Triangulasi dengan penggunaan *sumber*. Menurut Patton dalam Moleong (2011 : 330) menyebutkan bahwa triangulasi dengan *sumber* berarti membandingkan dan mengecek balik erajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang membedakan dalam penelitian kualitatif”. Pengecekan keabsahan data dengan sumber menurut Moleong (2011 : 331) dapat diketahui dengan cara:

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara

- b. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dan apa yang dikatakan orang secara pribadi
- c. Membandingkan dengan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu
- d. Membandingkan keadaan dengan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan
- e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Dalam penelitian ini untuk mengecek keabsahan data, peneliti lebih memfokuskan kepada membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.

